



OPD TERKAIT HARUS PANTAU HARGA BAHAN POKOK AGAR TETAP STABIL

AD



**SEBUT PERMASALAHAN LPJU BISA
DIATASI LEWAT PAD DARI PLN**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Menjelang Nataru harga sejumlah bahan pokok masyarakat diharapkan Legislatif tetap stabil.

OPD TERKAIT HARUS PANTAU HARGA BAHAN POKOK AGAR TETAP STABIL

TANJUNG REDEB - Sejumlah harga bahan pokok masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) diminta Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah dipantau dengan ketat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

Ia menerangkan, pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat menjelang akhir tahun 2023.

"Pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat. Jangan sampai stoknya menipis dan kemudian membuat lonjakan harga," ujarnya.

Dirinya memaparkan, bahan pokok yang wajib dipantau adalah beras, gula, minyak, hingga bahan-bahan pangan lainnya yang

dibutuhkan masyarakat. Termasuk ketersediaan unggas seperti ayam, yang banyak menjadi bahan konsumsi masyarakat.

"Harus dilakukan strategi yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang paling penting adalah memperhatikan ketersediaannya," katanya.

Politikus Golkar ini menekankan bahwa langkah-langkah antisipasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya terkait dengan perayaan-perayaan khusus seperti Nataru maupun hari besar lainnya saja.

"Semoga ini menjadi perhatian yang berkelanjutan. Karena bahan pangan pokok ini sangat krusial. Saya berharap harga di pasaran tetap stabil," tandasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

DORONG PEMERINTAH FASILITAS PENDIDIKAN WBP

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mendorong pemerintah memperhatikan kesehatan dan pendidikan para Warga Binaan Permasyarakatan (WBP).

Dia menerangkan, kesehatan dan pendidikan merupakan landasan utama untuk kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah daerah sudah seharusnya turut memperhatikan pendidikan dan kesehatan seluruh warganya, termasuk WBP," ungkapnya.

Dijelaskannya, perhatian kepada WBP yang bisa diberikan seperti pendidikan paket A, B dan C atau pendidikan penyetaraan. Dengan demikian, bekal bagi WBP akan bertambah dengan kebijakan pemerintah.

"Selain mendapatkan skill, ijazah tersebut bisa dipakai untuk mencari

pekerjaan saat ke luar dari Rutan," tuturnya.

Selain itu, kata Falentinus, pemberian pendidikan juga sesuai yang tertuang dalam undang-undang, di mana pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. "Sebab warga binaan juga membutuhkan perhatian," tegasnya.

Politikus Demokrat ini membeberkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, mayoritas warga binaan di Rutan Tanjung Redeb merupakan masyarakat Berau.

"Sehingga pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap pemberian pembinaan untuk pendidikan. Kalau bisa semuanya diberikan secara gratis," tutupnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya.

PEMERINTAH HARUS PAHAMI ATURAN YANG BERLAKU

TANJUNG REDEB - Peraturan yang berlaku dari Pemerintah pusat, provinsi maupun daerah harus dipahami oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya mengungkapkan, yang harus memahami aturan tersebut adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga dan instansi yang ada di lingkup Pemkab Berau.

"Beberapa masalah di daerah ini terkoneksi dengan aturan di pusat, sehingga perlu benar-benar dipahami batas dari aturan daerah maupun pusat. Karena ini nantinya juga berdampak pada kebijakan yang diambil," jelasnya.

Menurutnya, tanpa adanya pemahaman, maka pekerjaan dan pengawasan yang seharusnya ditangani daerah tidak bisa berjalan maksimal.

Bahkan ada yang terkesan dibiarkan hingga mangkrak.

Wendy mengaku terdapat beberapa aturan pusat, provinsi dan kabupaten yang bersifat tidak mutlak, sebab setiap daerah memiliki Perda.

"Dalam peraturan itu ada peran pengawasan yang tetap dilakukan pemerintah daerah," tegasnya.

Kendati demikian, Politikus Nas-Dem ini menegaskan, sudah menjadi tugas dan kewenangan DPRD Berau untuk selalu mengawasi kinerja ASN di semua OPD. Pengawasan itu harus ada dan sifatnya normatif karena diatur dalam undang-undang (UU).

"Jadi jangan ada lagi alasan dengan kalimat bukan kewenangan kita. Sehingga akhirnya bisa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kami di legislatif bekerja sesuai amanah UU," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

SEBUT PERMASALAHAN LPJU BISA DIATASI LEWAT PAD DARI PLN

TANJUNG REDEB - Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menyebutkan permasalahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dapat diatasi lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PLN.

Dia mengungkapkan, PLN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengantongi pemasukan dari pembayaran pelanggan yang tiap bulannya mencapai Rp 20 miliar.

Dinilainya, dengan besaran dana tersebut, bukan hanya bisa menambah jumlah titik LPJU, tetapi sekaligus maintenance LPJU yang sudah ada di wilayah Kabupaten Berau.

"Kenapa tidak kita ambil dari PAD

yang diberikan ke Pemkab Berau, itu untuk penambahan PJU yang masih sangat kurang. Apalagi dananya cukup besar," ungkapnya.

Politikus Gerindra ini mendorong Pemkab Berau untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut, apalagi manfaat itu berdampak langsung untuk masyarakat.

"Titik rawan kecelakaan dan tindak kriminal di Berau disebabkan kurangnya PJU, khususnya pada malam hari. Saya harap segera dicarikan solusinya. Karena penerangan jalan selain mempermudah saat berkendara, juga menekan angka kriminal saat malam hari," tutupnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

DORONG OPD TERKAIT CONTOH INOVASI PROVINSI LAIN YANG BERHASIL TARIK MINAT BACA MASYARAKAT

TANJUNG REDEB - Untuk menarik minat baca masyarakat, Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melahirkan inovasi-inovasi baru.

Ia menuturkan, minat baca masyarakat menjadi suatu hal penting, terutama mengenai kualitas pengetahuan generasi muda agar menjadi lebih unggul dan cerdas.

"Jika minat baca mereka tinggi, generasi muda juga bisa menambah wawasan terkait banyak hal yang mungkin tidak di dapatkan dalam pelajaran di sekolah," ujarnya.

Menurutnya, untuk melahirkan inovasi, OPD terkait dapat mencontoh provinsi lain yang berhasil dalam meningkatkan

minat baca masyarakat. Misalnya dengan mengembangkan perpustakaan daerah dengan konsep perpaduan ruang terbuka hijau.

"Nah, konsep yang seperti ini biasanya menjadi magnet bagi masyarakat, mereka bisa membaca sekaligus bersantai di tempat yang teduh dan tidak membosankan," terangnya.

Kendati demikian, dirinya berharap minat baca generasi muda semakin meningkat, seiring dengan pemenuhan fasilitas penunjangnya.

"Membaca sangat penting, karena banyak ilmu yang bisa didapatkan, pengetahuan dan wawasan akan semakin meningkat, tidak hanya memegang gadget terus," pungkasnya. (adv/set)



**SETELAH PULUHAN TAHUN,
KINI WARGA MENTAWIR BISA
NIKMATI AIR BERSIH DARI AIRNAV**



**RATUSAN THL PERSONEL
SATPOL PP PPU TUNGGU
KEPASTIAN STATUS**

SETELAH PULUHAN TAHUN, KINI WARGA MENTAWIR BISA NIKMATI AIR BERSIH DARI AIRNAV

BALIKPAPAN - Hidup bertahun-tahun lamanya hingga beranak cucu, ratusan masyarakat di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sulit untuk mendapatkan air bersih bagi kehidupannya sehari-hari.

Padahal, kawasan ini merupakan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di mana masyarakatnya bisa memperoleh air bersih dari air hujan atau membelinya dari depo pengisian air yang jaraknya paling dekat 9 kilometer.

Ketua Adat, Sahnun mengatakan, dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat di Kelurahan Mentawir hanya bergantung dari aliran sungai yang ada. Mulai dari MCK, masak hingga konsumsi.

"Semua pakai air sungai itu. Kalau mau air bersih ya nunggu hujan. Tapi kan sudah ada 4 atau 5 bulan di sini nggak ada hujan. Atau kalau mau ya beli di luar sana, tapi jauh sekali," ujarnya, Jumat (17/11/2023).

Senada dengan Sahnun. Warga RT 4 Kelurahan Mentawir, Ria Andini mengatakan, bahwa dirinya hanya menggunakan air sungai yang dikelola oleh para warga. Dan jika ingin memiliki air bersih, harus membelinya dulu dengan jarak yang cukup jauh dan harga relatif mahal.

"Warga di sini ya sehari-harinya mengandalkan air yang dari sungai itu. Disedot pakai pompa, dan dibagi ke rumah-rumah warga," jelasnya.

Jika ingin menjadi air konsumsi, Ria mengaku air tersebut harus di endapkannya selama dua sampai tiga hari dulu. "Ia kita harus diamkan dulu itu airnya. Kalau nggak ya masih kuning dan bau. Tapi kalau mandi sama cuci baju aja bisa langsung," tambahnya.

Terkait hal tersebut, Perum



Junior Manager Perencanaan dan Evaluasi TJSL AirNav Indonesia, Mario Hendrawan saat meresmikan depo air bersih di Kelurahan Mentawir.

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebagai BUMN yang memberikan layanan navigasi penerbangan di Indonesia, ikut mendukung komitmen pemerintah untuk memperbaiki lingkungan serta peningkatan target akses sanitasi dan air bersih yang berkelanjutan khususnya di wilayah IKN dan sekitarnya.

Junior Manager Perencanaan dan Evaluasi TJSL AirNav Indonesia, Mario Hendrawan mengatakan, melalui Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) berkomitmen untuk memberikan akses air bersih bagi masyarakat Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Program TJSL AirNav Indonesia untuk Kelurahan Mentawir meliputi pembangunan fasilitas mesin pengolah air payau menjadi air mineral siap minum, dengan bangunan pelindung permanen sejumlah 1 unit," ujarnya.

Fasilitas ini dibangun di Kantor Lurah Mentawir dan akan dikelola secara langsung oleh masyarakat setempat. Program

ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG), yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

"Kelurahan Mentawir merupakan salah satu wilayah yang akan menjadi bagian dari IKN. Namun, hingga saat ini, jaringan PDAM belum masuk ke wilayah tersebut. Pasokan air bersih hanya berasal dari sungai dan embung, yang kualitasnya rendah," jelasnya.

Program TJSL AirNav Indonesia untuk Kelurahan Mentawir yang merupakan program prioritas BUMN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain menjamin ketersediaan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi beban ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Para personel Satpol PP PPU saat apel. (Robbi/MediaKaltimGroup)

RATUSAN THL PERSONEL SATPOL PP PPU TUNGGU KEPASTIAN STATUS

PPU - Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih menunggu kepastian kejelasan status. Sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat yang akan menghapus status pegawai tenaga harian lepas (THL).

Setidaknya ada sekira 104 anggota Satpol PP PPU yang masih berstatus THL atau biasa disebut honorer. Mereka meminta kejelasan nasibnya untuk diangkat statusnya menjadi PNS.

"Ini bukan hanya perjuangan Satpol PP PPU saja. Melainkan perjuangan Satpol PP di seluruh Indonesia," ucap Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Sutanto, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, Satpol PP merupakan penegak aturan dengan tupoksi masing-masing dan langsung berurusan dengan masyarakat. Yakni ketentraman, Ketertiban umum (trantibum) sebagai penyelenggara tugas Negara.

Sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah setuju untuk honorer di-

angkat menjadi PNS. Hanya saja penentunya bukan Kemendagri, melainkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Itulah yang menjadi harapan kawan-kawan di Satpol PP yang sudah lama mengabdikan," ucapnya.

Opsi lainnya ialah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K. dirinya juga mendapat informasi bahwa memang mengarah kesana. Bisa jadi misalnya nanti kedepannya, status atau golongan P3K dapat diperbolehkan kembali. Misalkan untuk menjadi penyidik disertai regulasi-regulasinya, tentu mengikuti.

"Pada prinsipnya Kami mendukung setiap program pemerintah, yang penting mereka itu memiliki kejelasan status. Jangan sampai mereka honorer terus. Mereka juga memiliki resiko kerja yang tinggi. Kalau mereka statusnya masih tidak jelas, kan kasian juga. Apalagi dia menjalankan tugas Negara," pungkas Margono. (ADV/SBK)



Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor saat diwawancarai. (Robbi/MediaKaltimGroup)

KETUA DPRD PPU, DORONG PEMKAB BERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PEMERINTAHAN

PPU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor meminta kepada Pemkab PPU untuk bertindak tegas. Untuk mendukung pemberantasan narkotika, termasuk yang ada di dalam tubuh pemerintahan.

Untuk diketahui, Pemkab PPU belum lama ini menggelar tes urine pada semua pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL). Hasilnya, ada beberapa pegawai yang tesnya menunjukkan hasil positif narkotika.

Atas kejadian ini, Syahrudin sangat menyayangkan adanya oknum beberapa pegawai disalah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga mendorong Pj Bupati PPU Makmur Marbun untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

"Artinya jika memang itu terbukti hasilnya positif. Saya kira harus ada regulasi tegas yang mengatur itu. Tinggal nanti Bupati memberikan sanksi seperti apa," ujarnya, Jumat (17/11/2023).

Ia menekankan kepada pemerintah daerah untuk menindak tegas penyalahgunaan nar-

kotika di lingkungan pemerintahan. Pun meminta untuk rutin melakukan tes urine bagi pegawai ASN maupun THL secara berkala.

"Kita juga secara nasional bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba. Kalau sampai terindikasi itu kesalahan dan harus ditindak tegas," kata Syahrudin.

Kemudian, tes urine ini juga harus digelar secara merata di setiap OPD. Tak hanya pegawai, juga pada para legislator yang duduk di DPRD PPU.

"Jangan hanya di lingkup pemerintah di sana. Termasuk sekretariat DPRD PPU juga diperiksa. Termasuk saya, diperiksa. Tidak ada masalah," imbuhnya.

Lanjutnya, Syahrudin menyatakan sudah semestinya pemerintah melakukan penindakan secara tegas bagi pegawai yang terindikasi narkoba. Jika pemerintah tidak memberikan sanksi itu akan membuat citra pemerintah daerah dan pegawai menjadi buruk.

"Citra ASN akan menjadi buruk. Lingkungan pemerintah daerah harus bersih dari narkoba dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku," tutupnya. (ADV/SBK)



Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Sutanto saat konferensi pers pengamanan perempuan diduga terlibat praktik prostitusi, beberapa waktu lalu. (Robbi/MediaKaltimGroup)

SATPOL PP PPU DUKUNG PEMBERANTASAN PRAKTIK PROSTITUSI DI KAWASAN IKN

PPU - Satpol PP Penajam Paser Utara mendukung pemberantasan praktik prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Seiring dengan tumbuhnya berbagai usaha yang berhubungan dengan salah satu penyakit sosial di masyarakat itu.

Tekad memberantas prostitusi tersebut, sebagai bentuk kehadiran Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam menjaga ketenteraman, dan ketertiban umum (Trantibum). Penerapan regulasi berupa Perda 10/2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Penajam Paser Utara, harus dikawal dengan tindakan tegas.

"Kami berupaya memberantas prostitusi terselubung di warung remang-remang maupun daring," kata Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Susanto, Jumat (17/11/2023).

Untuk diketahui, Satpol PP sebelumnya pernah mengamankan empat perempuan asal luar PPU. Yakni perempuan asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Balik-

papan yang melakukan praktik prostitusi dari laporan masyarakat.

"Praktik prostitusi dilakukan melalui aplikasi daring untuk mendapatkan pelanggan dan satu wanita mengaku dalam dua hari melayani tujuh pelanggan," jelasnya.

Selanjutnya, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap empat perempuan tersebut. Serta mendalami untuk mengantisipasi adanya jaringan perdagangan orang atau ada koordinator dari praktik prostitusi itu.

Terlepas dari itu, pengelola penginapan maupun hotel juga diimbau untuk meningkatkan kedisiplinan dan menerapkan tata tertib. Agar penggunaan penginapan maupun hotel sesuai kaidah, bukan diperuntukkan bagi kegiatan prostitusi.

"Penanganan berbagai praktik prostitusi tidak hanya bisa dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum saja, warga juga harus turut serta menanggulangi perilaku atau kegiatan tersebut," pungkas Margono. (ADV/SBK)



Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Sutanto saat konferensi pers pengamanan perempuan diduga terlibat praktik prostitusi, beberapa waktu lalu. (Robbi/MediaKaltimGroup)

SATPOL PP PPU DUKUNG PEMBERANTASAN PRAKTIK PROSTITUSI DI KAWASAN IKN

PPU - Satpol PP Penajam Paser Utara mendukung pemberantasan praktik prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Seiring dengan tumbuhnya berbagai usaha yang berhubungan dengan salah satu penyakit sosial di masyarakat itu.

Tekad memberantas prostitusi tersebut, sebagai bentuk kehadiran Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam menjaga ketenteraman, dan ketertiban umum (Trantibum). Penerapan regulasi berupa Perda 10/2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Penajam Paser Utara, harus dikawal dengan tindakan tegas.

"Kami berupaya memberantas prostitusi terselubung di warung remang-remang maupun daring," kata Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Susanto, Jumat (17/11/2023).

Untuk diketahui, Satpol PP sebelumnya pernah mengamankan empat perempuan asal luar PPU. Yakni perempuan asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Balik-

papan yang melakukan praktik prostitusi dari laporan masyarakat.

"Praktik prostitusi dilakukan melalui aplikasi daring untuk mendapatkan pelanggan dan satu wanita mengaku dalam dua hari melayani tujuh pelanggan," jelasnya.

Selanjutnya, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap empat perempuan tersebut. Serta mendalami untuk mengantisipasi adanya jaringan perdagangan orang atau ada koordinator dari praktik prostitusi itu.

Terlepas dari itu, pengelola penginapan maupun hotel juga diimbau untuk meningkatkan kedisiplinan dan menerapkan tata tertib. Agar penggunaan penginapan maupun hotel sesuai kaidah, bukan diperuntukkan bagi kegiatan prostitusi.

"Penanganan berbagai praktik prostitusi tidak hanya bisa dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum saja, warga juga harus turut serta menanggulangi perilaku atau kegiatan tersebut," pungkas Margono. (ADV/SBK)



Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki saat ditemui di ruangannya. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PENINGKATAN JALAN KE IKN PERLU DITAMBAH PENERANGAN IDEAL

PPU - Lembaga legislatif, DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta peningkatan aksesibilitas penghubung daerah dan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus ditingkatkan. Hal ini untuk semakin mendekatkan pembangunan antara pusat negara dan daerah penyenggangnya.

Khusus akses jalan, poros menuju IKN dari arah pusat PPU, mulai akhir tahun lalu telah ditingkatkan. Pun kini peningkatan terus dilakukan di beberapa titik jalan penghubung lainnya.

Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki menuturkan apa yang dilakukan pemerintah dalam menyokong pemindahan IKN sudah sangat baik. Khusus untuk peningkatan akses ke IKN, ia menyebutkan peningkatan juga perlu dilakukan di sisi penerangan.

"Jalan poros dari Simpang Silkar Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam sampai Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah Kota Nusantara belum ada terpasang penerangan yang ideal," katanya, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, hal ini harus segera diperhatikan. Meninggkat mulai saat ini saja, mobilisasi pengguna jalan tersebut semakin masif.

"Termasuk jalan poros di Kecamatan Sepaku juga belum terpasang PJU, adanya PJU

agar meminimalisir kecelakaan," tambahnya.

Tentu, sambung Hartono, ini juga berdampak pada masyarakat secara langsung. Gelapnya jalan itu, berpotensi membahayakan masyarakat yang melintas, ditambah banyaknya kendaraan besar yang juga menggunakan jalan yang sama.

"Dikhawatirkan jalan yang gelap mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau kriminalitas jalanan," sebutnya.

Arus kendaraan yang melalui jalan simpang Silkar Kelurahan Petung menuju Kecamatan Sepaku, tembus kilometer 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kutkar) semakin meningkat. Sejalan dengan cepatnya proses pembangunan infrastruktur pendukung IKN.

Untuk itu, Hartono menegaskan pada pemerintah yang berwenang, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kaltim atau Pemkab PPU bahkan Otorita IKN, agar bisa memperhatikannya. Sebab, jika hal ini luput dari pembangunan yang dilakukan, maka masyarakat bisa dipastikan menanggung akibatnya.

"Penerangan jalan umum harus jadi perhatian pemerintah pusat, karena jalan poros itu merupakan jalan negara," pungkasnya. (ADV/SBK)



GAGALKAN PEREDARAN 3 KG GANJA, SATRESKOBA POLRES KUKAR TANGKAP 3 ORANG PRIA



**Sambangi BPH Migas, Wabup Kukar
Sampaikan Keluhan Kelangkaan BBM
untuk Nelayan**



Ketiga tersangka bersama batang bukti setelah diamankan Satreskoba Polres Kutar. (Istimewa)

GAGALKAN PEREDARAN 3 KG GANJA, SATRESKOBA POLRES KUKAR TANGKAP 3 ORANG PRIA

TENGGARONG - Gagal peredaran narkotika jenis ganja, Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kutai Kartanegara (Kutar) amankan tiga orang tersangka. Penangkapan ini diungkapkan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena, melalui Kasat Resnarkoba AKP Aksarudin Adam, pada Kamis (16/11/2023) kemarin.

Aksaruddin mengungkapkan, tiga orang yang berhasil timnya ringkus adalah ERR (33), PAV (28) dan HPP (35). Dari tangan ketiganya didapati barang bukti berupa 3 kg ganja kering siap edar.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat, yang memberikan informasi bahwa di Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kutar, terdapat pria yang kerap membawa narkotika.

Berdasarkan informasi tersebut, Aksarudin memimpin langsung timnya melakukan penyelidikan

di lokasi yang dilaporkan. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, polisi mencurigai sorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan.

"Tersangka yang pertamakali diamankan adalah ERR," kata Aksarudin.

Akhirnya pada Senin (13/11/2023) malam, ERR ditangkap di RT 48 Jalan Maduningrat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Ia diringkus setelah Polisi membuntutinya saat keluar dari rumahnya di Jalan Arwana Blok D, Kelurahan Timbau.

Setelah diamankan dan diinterogasi, ERR mengaku menyimpan satu bungkus besar ganja di kediamannya. Barang haram tersebut ia dapatkan dari dua orang rekannya PAV dan HPP.

Berdasarkan keterangan EER, Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap PAV, yang merupakan kurir di

salah satu perusahaan jasa ekspedisi di Jalan PM Noor, Sempaja, Kota Samarinda. Dari tangan PAV didapati 1 buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan EER.

Sedangkan HPP diamankan di Jalan Wahid Hasyim I, Gang Kampus Biru Kelurahan Sempaja Selatan. Dengan barang bukti 1 bungkus besar ganja kering, 1 bungkus sedang ganja kering, 73 paket kecil ganja siap edar.

Kemudian di rumah kontranya Jalan Wira Tirta Gang Senggol, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ditemukan kembali 6 bungkus kecil ganja kering.

"Ketiga pelaku ERR, PAV dan HPP akan dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Juncto Pasal 111 Ayat 2 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Suasan Kunjungan Rendy Solihin Ke BPH Migas. (latimewa)

Sambangi BPH Migas, Wabup Kukar Sampaikan Keluhan Kelangkaan BBM untuk Nelayan

TENGGARONG - Perhatian serius diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap nelayan. Selain program 25 ribu nelayan produktif yang telah berjalan hampir 100 persen dengan memberikan banyak bantuan. Ketersediaan bahan bakar subsidi untuk nelayan juga terus diperjuangkan.

Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendy Solihin, pun secara khusus menyambangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Untuk menyampaikan keluhan para nelayan di Kukar, terkait kelangkaan bahan bakar bersubsidi.

"Setiap kali melakukan kunjungan di beberapa titik di wilayah Kukar, khususnya di wilayah pantai yang selalu jadi keluhannya adalah ketersediaan bahan bakar," terang Rendy.

Padahal, Kukar merupakan kabupaten dengan populasi nelayan paling banyak di Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk itu, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk menghadirkan SPBUN di kawasan yang menjadi sentra nelayan, untuk memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi bagi mereka.

Rendy berharap tahun 2024 mendatang, BPH Migas bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk nelayan yang berada di tiga

kecamatan. Yakni Samboja, Muara Jawa dan Sangasanga.

Memingat selama ini, hampir semua masyarakat di sana, kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Selama ini mereka terpaksa membeli bahan bakar dari kota Samarinda atau Balikpapan.

Menjawab apa yang dikeluhkan orang nomor dua di Kukar itu, perwakilan dari BPH Migas, Sentot Harijady memberikan penjelasan. Untuk mengajukan kebutuhan bahan bakar di daerah, pemerintah daerah perlu untuk mengajukan terlebih dahulu kebutuhan diwilayahnya.

Setelah itu, pihak BPH Migas melakukan pengkajian kuota bahan bakar untuk didistribusikan. Mengingat penyaluran bahan bakar tidak hanya dilakukan berdasarkan prioritas atau kebutuhan, tapi juga memperimbangan keterbatasan persediaan.

"Jadi itu nanti akan kami bagi berdasarkan data pemerintah daerah. Jadi selama ini untuk realisasi pemenuhan kebutuhan yang diperlukan belum terdata sehingga penyediaan kuota khusus yang diberikan berdasarkan data yang masuk," ujar Harijady.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Penyerahan kendaraan operasional kepada penyuluh pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang. (Istimewa)

Bupati Kukar Serahkan Puluhan Kendaraan Operasional Penyuluh Pertanian

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menyerahkan puluhan kendaraan operasional, untuk para penyuluh pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar). Penyerahan dilakukan di Halaman Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang.

Puluhan kendaraan operasional sendiri, merupakan realisasi dari program dedikasi Kukar Idaman, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026.

Edi Damansyah menjelaskan, penyerahan kendaraan operasional ini sudah sesuai dengan keberadaan para penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yakni bekerja di lapangan untuk meningkatkan sektor pertanian hingga desa yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang.

“Guna mendukung dan mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur,” katanya.

Ia pun berharap, penyuluh pertanian bisa semakin mudah dalam memberikan sosialisasi kepada para petani di Kecamatan Tenggarong Seberang. Memastikan dapat pula berdampak langsung kepada para petani, bagaimana upaya sosialisasi meningkatkan hasil panen.

“Saya juga berharap agar para penyuluh terus semangat dan berikan pelayanan terbaik bagi para kelompok tani di masing-masing zona, sehingga hasil dan produksi pertanian dalam arti luas di Kutai Kartanegara terus meningkat dan berkualitas,” tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



PROGRAM WOLBACHIA BERBAHAYA? BEGINI TANGGAPAN KADINKES BONTANG

BACA HALAMAN A2



KOMISI III TINJAU KORBAN LONGSOR DI BERBAS TENGAH



Program Wolbachia Berbahaya? Begini Tanggapan Kadinkes Bontang

BONTANG - Program pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan teknologi Wolbachia kini sedang menjadi sorotan publik. Isu inipun mendapat tanggapan dari Kepala Dinkes (Kadinkes) Bontang, drg Toetoe Pribadi Ekowati.

Diketahui Bontang menjadi salah satu kota sebagai daerah ujicoba teknologi wolbachia ini bersama Jakarta Barat, Bandung, Semarang, dan Kupang. Sebelumnya, metode wolbachia ini sudah diujicobakan di Yogyakarta.

Dikatakan drg Toetoe, bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum merilis program wolbachia tersebut. Pihaknya sudah memberikan pemahaman ke masyarakat, sehingga masyarakat siap sebelum program tersebut dirilis.

"Kami sudah sosialisasi dan pahami masyarakat. Masyarakat sudah siap sebelum aplikasi di lapangan. Alhamdulillah masyarakat paham dan mendukung," ujarnya singkat.

Pers Release Kemenkes RI

Guna mendukung argumennya tersebut, drg Toetoe menambahkan pers release yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta tertanggal 13 November 2023 berjudul 'Inovasi Wolbachia Efektif Turunkan Kasus DBD.' Diketahui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

Dijelaskan, bahwa Kementerian Kesehatan menerapkan inovasi teknologi wolbachia untuk menurunkan penyebab

Lanjutan Utama

aran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Teknologi Wolbachia merupakan salah satu inovasi yang melengkapi strategi pengendalian yang berkasnya sudah masuk ke Stranas (Strategi Nasional).

Sebagai pilot project, dilaksanakan di 5 kota yaitu Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang dan Kota Bontang berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341 tentang Penyelenggaraan Pilot project Implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan dengue.

Selain di Indonesia, Pemanfaatan teknologi Wolbachia juga telah dilaksanakan di negara lain (Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Mexico, Kiribati, New Caledonia, Sri Lanka) terbukti efektif untuk pencegahan dengue.

Efektivitas wolbachia telah diteliti sejak 2011 yang dilakukan oleh WMP di Yogyakarta dengan dukungan filantropi yayasan Tahija. Penelitian dilakukan melalui fase persiapan dan pelepasan aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas (2011-2015).

Wolbachia ini dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk aedes aegypti, sehingga virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Jika aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan aedes aegypti betina maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblokir. Selain itu, jika yang berwolbachia itu nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia.

Sebelumnya uji coba penyebaran nyamuk ber-Wolbachia telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada tahun 2022. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar Wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77 persen, dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86%.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani juga menegaskan adanya penurunan penyebaran Dengue yang signifikan setelah adanya penerapan Wolbachia.

"Jumlah kasus di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Mei 2023 diband-

ing pola maksimum dan minimum di 7 tahun sebelumnya (2015 - 2022) berada di bawah garis minimum," terang Emma

"Masyarakat pada awalnya memang ada kekhawatiran karena pemahaman dari masyarakat itu nyamuk ini dilepas kok bisa mengurangi (DBD). Tapi seiring berjalan dan kita sudah ada edukasi, ada sosialisasi, sekarang masyarakat justru semakin paham, bahwa sebenarnya teknologi ini untuk mengurangi DBD," papar Sigit Hartobudiono, Lurah Patangpuluhan Yogyakarta

Kendati demikian, keberadaan inovasi teknologi Wolbachia tidak serta merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian dengue yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap diminta untuk melakukan gerakan 3M Plus seperti Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Program Wolbachia Ditolak Mantan Kemenkes RI

Di sisi lain, mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari dengan tegas menolak penyebaran nyamuk bionik Wolbachia.

"Penyebaran nyamuk Wolbachia ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Segera hentikan!" ujar Siti Fadilah Supari.

"Ini seperti mengorbankan rakyat kita untuk menjadi kelinci percobaan, hal ini tidak dapat diterima. Siapa yang akan bertanggung jawab atas resiko-resiko yang mungkin muncul," pungkas Siti Fadilah Supari saat konferensi pers.

Pada hari Minggu (12/11), "Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia" menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait adanya program Pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam jumlah jutaan.

Acara tersebut tak hanya dihadiri oleh Mantan Menkes RI Siti Fadilah, melainkan banyak pembicara lainnya seperti Komjen Pol Drs Dharma Pongrekun SH MM MH, Mirah Sumirat SE (Presiden ASPEK Indonesia) dan Dr Ir Kun Wardana Abyoto, MT.

Penulis/Editor: Yusva Alam



Suharno, Anggota Komisi II DPRD Bontang. (Dwi).

Suharno Desak Pemkot Tingkatkan Promosi Wisata Bontang

BONTANG - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Suharno mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang agar segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Lantaran menurutnya, Wali Kota Bontang sudah menetapkan, bahwa Kota Bontang ditetapkan sebagai kota pariwisata.

"Kami masih membahas terkait dengan perkembangan pariwisata untuk ke depannya, dengan membentuk BPPD," ucapnya saat diwawancarai, Jumat (17/11/2023).

Dirinya sangat berharap, ke depannya Bontang bakal ada promosi yang memadai. Dimana pemkot harus gencar memasarkan wisata Bontang ke masyarakat luar, agar bisa mengetahui dan datang berkunjung ke Bontang.

"Kita ini memiliki tempat wisata yang sangat bagus, apalah artinya jika kita mempunyai destinasi yang bagus tetapi tidak diketahui oleh masyarakat luar," bebernya.

Selama ini kegiatan wisata juga baru melibatkan warga lokal saja, inginnya mengundang warga dari luar sehingga bisa menambah dan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau warga luar yang datang, otomatis penginapannya, makannya sudah pasti di Bontang, jadi ini juga salah satu membantu perekonomian warga Bontang," ungkapnya.

Nantinya jika wisatanya di suatu daerah maju, itu karena adanya warga yang datang berkunjung. Selain memperkenalkan pariwisatanya, juga membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Bontang.

"PAD ini ujung tombaknya adalah pariwisata, jadi gimana kita menjadikan Bontang sebagai kota pariwisata. Kita harus membuat perhatian khusus terkait ini," katanya.

Suharno juga menambahkan, untuk wisata di Malahing dan Tihi-Tihi sudah di program, karena di sana memang memiliki destinasi yang cukup bagus. Jika nantinya sudah dikelola, sangat yakin bukan hanya wisatawan nasional saja yang berdatangan, akan tetapi masyarakat dari negara luar bisa juga langsung datang ke Bontang.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Komisi III DPRD Bontang saat melakukan peninjauan di lokasi longsor Berbas Tengah. (Dwi S).

Komisi III Tinjau Korban Longsor di Berbas Tengah

BONTANG - Rombongan Anggota Komisi III DPRD Bontang meninjau salah satu rumah warga yang terdampak longsor di Kelurahan Berbas Tengah, RT. 53, Kecamatan Bontang Selatan, beberapa waktu lalu.

Amir Tosina, Ketua Komisi III mengatakan, tujuan diadakannya inspeksi mendadak (Sidak) ini untuk melihat secara langsung kondisi rumah warga yang terdampak longsor. Karena tempat yang mereka bangun untuk membuat pondasi sangat tidak layak.

"Tidak ada landasan dan penataan yang sesuai standar dalam pemban-

gunan rumah warga. Sebab, mereka tergolong warga miskin," ungkapnya.

Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) dihadirkan untuk memberikan arahan dan menindaklanjuti dampak longsor ini.

"Saya minta pihak kelurahan dapat menganggarkan dana untuk rumah, bagi warga sekitaran longsor," paparnya.

Tanggapan positif diberikan keduanya dengan perencanaan penurapan, dan berkoordinasi dengan pihak

Kelurahan Berbas Tengah. Karena keadaan ekonomi, warga membangun secara asal rumahnya di atas tanah miring tanpa penurapan dan landasan rumah.

"Bahkan di dalam rumah warga itu ada celah-celah, dan bisa jadi sewaktu-waktu longsor bisa datang kapan saja untuk mengancam keselamatan warga," bebernya.

Dirinya berharap pemerintah dapat membantu warganya dengan menguskannya di Musrenbang selanjutnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam



Muhammad Irfan, (tengah, berbaju putih) Anggota Komisi I DPRD Bontang saat menyampaikan pendapatnya. (Dwi S).

Anggota Komisi I Tolak Buaya Riska Kembali ke Habitatnya

BONTANG - Komisi I DPRD Bontang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II, Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (14/11/2023).

RDP kali ini bersama Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Camat Guntung, Perwakilan Taman Nasional Kutai (TNK), beserta tokoh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Muhammad Irfan, Anggota Komisi I DPRD Bontang menyatakan menolak kembalinya Buaya Riska ke Bontang, karena banyak pertimbangan yang akan dilakukan jika itu terjadi.

"Pastinya banyak pertimbangan, dan juga sangat banyak anggaran yang akan dikeluarkan untuk berbagai macamnya," ucapnya saat rapat bersama, Selasa (14/11/2023) kemarin.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya menghabiskan waktu dan energi hanya untuk mengurus satu ekor buaya tersebut. Jika pun Buaya Riska akan kembali, dengan pilihan yang ditawarkan oleh pihak BKSDA Kalimantan Timur (Kaltim).

"Sangat diperkirakan anggaran yang akan dikeluarkan pastinya tidak sedikit. Saya menganggap dampak ekonominya minim," paparnya.

Dikatakannya, bahwa BKSDA juga telah menjelaskan dalam RDP lalu, bahwa tidak diperkenankan lagi ada bentuk peragaan ekstrem seperti mencium dan memeluk segala macam, karena bagaimana pun ini adalah hewan buas, yang akan memangsa siapa saja dan kapan saja.

"Saya rasa, jika memang aman untuk penangkaran di sana lebih baik tidak perlu dikembalikan lagi ke asalnya, kita hanya mencari aman saja," tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam



Ilustrasi SKM. (ist)

DPMPTSP Lakukan SKM Berkala, Baik Internal Maupun Eksternal

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.

Hasil SKM ini juga akan digunakan oleh pimpinan, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penetapan kebijakan layanan, sehingga kualitas dari penyelenggaraan layanan publik dapat terus ditingkatkan.

"Seperti yang kita ketahui, DPMPTSP merupakan salah satu instansi penyelenggara layanan publik," jelas Kepala DPMPTSP Bontang, Asdar Ibrahim.

Terdapat dua SKM yakni eksternal dan internal. Untuk eksternal menggunakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, diperoleh nilai 87,50, artinya kualitas pelayanan DPMPTSP Bontang adalah Baik. Nilai tersebut diperoleh

dari total 265 responden.

"Tiap tahun ada survei, dengan surveyor lapangan itu mahasiswa Bontang secara manual, DPMPTSP tidak ikut serta. Jadi kami hanya menerima rilisnya saja," ungkapnya.

Sedangkan internal, melalui aplikasi Perizinan Digital (PD) dan seluruh perizinan tidak dapat diproses sampai akhir sebelum mengisi SKM. Namun hasil tersebut hanya sebagai perbandingan dari hasil yang dikeluarkan pemerintah untuk diekspose ke masyarakat.

Hasil survei diambil berdasarkan sembilan unsur layanan, yakni penanganan pengaduan, kesesuaian/kewajaran biaya, perilaku petugas pelayanan, kompetensi petugas, prosedur pelayanan, kesesuaian pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian persyaratan, dan kualitas sarana dan prasarana. (sya/adv)



drg Hena Ratnasari, Sp.KGA. (Yahya Yabo)

Mengenai Klinik Gigi Anak RSUD Bontang

BONTANG – Klinik Kedokteran Gigi Anak di RSUD Taman Husada Bontang melakukan perawatan gigi pada anak usia 0 sampai dengan 18 tahun. Area perawatan dimulai dari bedah mulut, konservasi, prostodonti hingga ortodonti.

Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak RSUD Taman Husada Bontang, drg Hena Ratnasari, Sp. KGA menjelaskan, kedokteran gigi anak memiliki cakupan yang lebih luas untuk pelayanan pada gigi anak. Kedokteran gigi anak melakukan perawatan kepada permasalahan gigi anak seperti gigi berlubang, gigi terpendam (gigi impaksi) dan permasalahan gigi anak lainnya.

"Banyak permasalahan gigi anak yang kami tangani dengan melakukan perawatan gigi, seperti permasalahan odontektomi dan eksposur," jelasnya, Kamis (16/11/2023).

Lanjut, drg Hena mengatakan, pasien anak-anak setiap harinya bisa mencapai 20-25 anak dengan berbagai macam permasalahan gigi, seperti

permasalahan gigi dengan melakukan perawatan penambalan atau konservasi dan pencabutan serta orthodonti.

Ia mengharapkan, tingkat karies atau gigi berlubang berkurang dengan melakukan perawatan gigi pada anak.

"Gigi berlubang bisa sampai 80-90 persen. Perawatannya bisa dengan dicabut atau dengan melakukan penambalan gigi. Sering kali pasien datang ke poli gigi anak dengan kondisi gusi dan pipi bengkak," ungkapnya.

Sementara untuk ketersediaan SDM dokter spesialis gigi anak dan tenaga perawat gigi telah memenuhi dengan kapasitas, satu dokter spesialis gigi anak dan masing-masing memiliki perawat gigi. Ia mengatakan, pasien yang datang berasal dari pasien BPJS Kesehatan, umum, dan asuransi perusahaan.

"SDM di klinik gigi anak sudah cukup dengan ketersediaan SDM dan alat-alat medis standar untuk gigi anak," terangnya. (adv /yah)



Pemeriksaan penyakit jantung oleh dokter spesialis jantung di RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

Mengenal Klinik Jantung RSUD Taman Husada Bontang

BONTANG – Klinik Jantung Rumah Sakit Taman Husada Bontang melayani penderita penyakit jantung dan pembuluh darah.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr Suhardi, Sp.JP mengatakan, poli jantung buka sesuai jadwal rumah sakit di setiap jam kerja. Pasien yang datang ke poli jantung memiliki bermacam penyakit seputar jantung dan pembuluh darah.

"Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah merupakan dokter yang ahli menangani penyakit seputar jantung dan pembuluh darah. Biasanya seperti penyakit jantung koroner, hypertensive heart disease, penyakit katup jantung, penyakit bawaan hingga gagal jantung," jelas dr Suhardi, Sp.JP.

Dr Suhardi menambahkan, pada poli klinik jantung, dokter spesialis jantung juga memeriksa baik fisik maupun pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat-alat medis untuk jantung.

"Selain pemeriksaan fisik bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, EKG, Echocardiography, CT Coronary, Treadmill, Angiography Coronary dan

Holter Jantung," kata dr Suhardi.

Untuk proses pelayanannya sendiri, dr Suhardi mengatakan poli klinik jantung sama dengan poli klinik lainnya di RSUD Taman Husada Bontang, dengan melakukan pendaftaran secara online hingga pemeriksaan laboratorium dan ke apotek. Adapun pasien yang datang bisa mencapai 30 pasien per hari.

"Pendaftaran ke poli jantung bisa online kemudian antrean, dilakukan pemeriksaan. Bisa laboratorium atau radiologi dan terakhir mengantre obat di apotek. Rata-rata kunjungan pasien 30/hari," ungkapnya.

Ia pun mengharapkan ke depannya, poli klinik jantung dapat menangani semua jenis penyakit jantung dengan menggunakan alat-alat medis yang terbaru yang dimiliki RSUD Taman Husada tanpa harus merujuk ke rumah sakit lainnya.

"Kebanyakan pasien BPJS. Asalkan sudah ada rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP). Selama ini berjalan lancar saja. Karena obat dan alat kesehatan sudah lumayan komplit," terangnya. (adv/yah)

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI SABTU
18 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



RATUSAN KENDARAAN DI BALIKPAPAN TERJARING RAZIA PAJAK KENDARAAN



**BAWASLU BALIKPAPAN
TERTIBKAN RATUSAN ALAT
PERAGA SOSIALISASI**



Ditlantas Polda Kaltim, Bapenda Balikpapan dan PT Jasaraharja menggelar razia pajak kendaraan di kawasan Balikpapan Baru, Jumat (17/11).

RATUSAN KENDARAAN DI BALIKPAPAN TERJARING RAZIA PAJAK KENDARAAN

BALIKPAPAN - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Balikpapan dan PT Jasa Raharja menggelar razia pajak kendaraan di kawasan Balikpapan Baru, atau tepatnya di Jalan Tjutjup Suparna, Jumat (17/11/2023).

Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan, melalui Kasub Bin Ops Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Bangun mengatakan, razia ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran pajak kendaraan.

"Razia ini didukung armada bus Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) keliling di lokasi. Kami bersama tim gabungan melakukan penertiban dan imbauan," ujarnya.

Lebih lanjut Bangun menjelaskan, dari giat razia ini hasilnya sebanyak 697 pengendara terjaring razia gabungan tersebut. Dari

697 unit pengendara yang terjaring diantaranya, sepeda motor atau R2 sebanyak 557 unit dan mobil atau R4 sebanyak 140 unit.

"Kendaraan Bermotor (KB) di Kaltim sebanyak 57 unit terdiri dari 50 unit R2 dan 7 unit R4, kendaraan dari luar Kaltim sebanyak 7 unit terdiri dari 3 unit R2 dan 4 unit R4. Dari hasil razia tersebut sebanyak 15 unit kendaraan bermotor membayar pajak kendaraanya dengan total Rp 4.700.000 melalui layanan Samsat Bus Keliling," jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD PPRD Bapenda Balikpapan, Said Ahmad Cyrus Halib mengatakan, terdapat puluhan pengendara yang terjaring razia, dan didominasi oleh roda dua yang terjaring dalam razia ini.

"Mereka yang didapati belum membayar pajak kendaraanya langsung diarahkan untuk membayar ke bus Samsat keliling," ujarnya.

"Bagi yang tidak memiliki dana, dilakukan pendataan dan diberikan surat untuk pembayaran selanjutnya," tambah Said Ahmad.

Said Ahmad menjelaskan, razia ini tidak sekadar menegakkan kewajiban membayar pajak, tetapi juga sebagai bagian dari sosialisasi terkait pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.

"Pembayaran pajak memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan daerah. Sebagai insentif, program Pemutihan atau Relaksasi Pajak berlangsung hingga 28 Desember 2023 mendatang, dengan tujuh poin pemutihan, termasuk pembebasan denda PKB dan BBNKB, diskon bagi pembayaran tepat waktu, dan diskon bagi penunggak pajak dengan durasi tertentu," tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

BAWASLU BALIKPAPAN TERTIBKAN RATUSAN ALAT PERAGA SOSIALISASI

BALIKPAPAN - Dalam rangka menjaga integritas dan kondisitas Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan guna menertibkan alat

peraga sosialisasi (APS) berupa baliho atau spanduk yang melanggar aturan berlaku.

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Wasanti mengatakan, tindakan ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan proses sosialisasi partai politik peserta pemilu berlangsung secara adil, transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"PKPU mengatur jadwal kampanye Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Bawaslu Kota Balikpapan mencatat sebelum penetapan DCT terdapat 673 APS yang melanggar ketentuan PKPU," ujarnya, Jumat (17/11/2023).

Lebih lanjut Wasanti menjelaskan, dari 637 APS yang melanggar di antaranya terdapat di Balikpapan Selatan sebanyak 131 APS, Balikpapan Utara sebanyak 110 APS, Balikpapan Timur sebanyak 167 APS, Balikpapan Tengah sebanyak 166 APS, Balikpapan Kota sebanyak 37 APS dan Balikpapan Barat sebanyak 62 APS.

"Bawaslu RI telah menerbitkan Imbauan Nomor 774/PM/K1/10/2023 yang menyatakan selain Partai Politik Peserta Pemilu, Bacaleg DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga dapat melakukan sosialisasi berupa pemasangan baliho atau spanduk atau sejenisnya namun dengan ketentuan tidak memuat unsur ajakan atau unsur kampanye dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Adapun APS yang dilarang berupa reklame, spanduk dan atau umbul-umbul yang paling sedikit memuat visi misi, program,



Satpol PP Kota Balikpapan saat melakukan penertiban alat peraga sosialisasi (APS).

dan atau citra diri peserta pemilu. Berisi ajakan untuk memilih peserta pemilu. Ditempatkan di lokasi-lokasi yang dilarang sesuai peraturan berlaku.

Wasanti menambahkan, berdasarkan data penertiban APS yang sedang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Balikpapan, angka ini tentunya akan terus bergerak meningkat, mengingat Bawaslu Kota Balikpapan bersama tim terpadu akan terus melakukan proses penertiban sampai dengan 27 November 2023.

"Temuan ini menunjukkan, sejauh ini terdapat peningkatan jumlah sebaran APS sebesar 26 persen pasca penetapan DCT dibandingkan dengan hasil inventarisir jajaran pengawas yang dilakukan sebelum penetapan DCT sejumlah 673 APS tersebar di Kota Balikpapan," tambahnya.

Dalam rangka melakukan pendataan persebaran APS berupa baliho atau spanduk melanggar yang tersebar di Bawaslu Kota Balikpapan, Jajaran Bawaslu Kota Balikpapan, Panwaslu Kecamatan hingga PKD di Kota

Balikpapan telah melakukan inventarisir persebaran APS melanggar di Kota Balikpapan.

Selain itu Bawaslu Balikpapan telah berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan, Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Satpol PP Kota Balikpapan, DPMPTSP dan BPPDRD Kota Balikpapan terkait penertiban APS.

"Hasil dari koordinasi tersebut Bawaslu Balikpapan memberikan rekomendasi atas hasil Inventarisir APS kepada pihak Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Satpol PP Kota Balikpapan yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban.

Bawaslu Kota Balikpapan juga melakukan upaya edukasi dan imbauan kepada partai

politik dan masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku terkait pemasangan alat peraga sosialisasi (APS). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik," tutup Wasanti.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI SABTU
18 NOV 2023



SILATURAHMI DENGAN WARTAWAN, PJ GUBERNUR AKMAL MALIK DORONG PERAN MEDIA DALAM PEMERINTAHAN



**PENYELENGGARA 'SEMANGKA UNTUK
GAZA', SERAHKAN TANDA APRESIASI
KEPADA PJ GUBERNUR KALTIM**



Coffee Morning Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama wartawan di Kaltim, digelar di Pendopo Gubernur Kaltim pada Jumat (17/11/2023)

SILATURAHMI DENGAN WARTAWAN, PJ GUBERNUR AKMAL MALIK DORONG PERAN MEDIA DALAM PEMERINTAHAN

SAMARINDA - Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menggelar pertemuan silaturahmi dalam acara Coffee Morning bersama awak media. Acara berlangsung di Pendopo Gubernur Kaltim pada Jumat (17/11/2023) pagi ini. Hadir para pemimpin redaksi dari berbagai media online dan media cetak di Kaltim, termasuk jajaran redaksi Mediakaltim.com. Ikut mendampingi Gubernur Kaltim, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal.

Dalam sambutannya, Akmal Malik mengatakan bahwa media merupakan mitra pemerintah yang mampu menyediakan informasi tentang seluruh wilayah Kaltim.

"Seluruh wilayah di Kaltim, termasuk Bontang dan Paser, kami berharap media dapat menyediakan informasi yang ju-

jur kepada pemerintah, sehingga kami dapat memahami situasi sebenarnya di wilayah tersebut. Jika memungkinkan, kami akan mengundang wartawan untuk mengunjungi daerah tersebut," ucapnya.

Pj gubernur tersebut juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawasi birokrasi agar pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada. Media menjadi wadah komunikasi yang vital antara masyarakat, media, dan pemerintah, sehingga daerah dapat berkembang menuju arah yang lebih baik.

"Kami akan menjadwalkan pertemuan seperti ini setiap bulan, agar diskusi kami tetap berjalan. Kami akan menyiapkan topik-topik terkait daerah, sehingga pertemuan ini akan men-

jadi lebih berarti. Kami akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjadwalkannya," tambahnya.

Selanjutnya, Akmal Malik juga berencana untuk berkoordinasi dengan Panglima Kodam VI/Mulawarman dalam rangka kegiatan safari selama seminggu. Ini dilakukan agar pihaknya dapat melihat langsung kondisi di lapangan.

"Kami akan mengatur jadwalnya satu bulan sekali secara bergantian. Jika tujuan safari tersebut dapat memberikan manfaat bagi media dalam memberikan informasi kepada masyarakat, maka itu akan menjadi pencapaian yang positif," tegas Akmal Malik. (Nta)

Pewarta: Nita

Editor: Agus Susanto



(Dari kiri) Pewarta RRI Boy, Pewarta Tribun Kaltim Fairus, Pewarta Media Kaltim Andi Desky, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Founder Kalimantan Rusdi, dan Pewarta Samarinda Pos Risky

PENYELENGGARA 'SEMANGKA UNTUK GAZA', SERAHKAN TANDA APRESIASI KEPADA PJ GUBERNUR KALTIM

SAMARINDA - Penyelenggara kegiatan penggalangan dana dan solidaritas Palestina 'Semangka untuk Gaza', menyerahkan plakat tanda apresiasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, yang telah berkontribusi terhadap kegiatan tersebut.

Selain menyerahkan plakat, pihak pemrakarsa yang mayoritas merupakan jurnalis ini, menyerahkan buku berjudul 'Perang di Samarinda' karya sejarawan Kaltim M.Sarip yang merupakan buku yang dijual di gelaran Semangka untuk Gaza.

Perwakilan penyelenggara, Andi Desky yang sekaligus pewarta Mediakaltim.com menyam-

paikan bahwa penyerahan ini sekaligus mempererat silaturahmi dengan pria kelahiran Sumatera Barat tersebut.

"Pagi tadi Pak Pj Gubernur menggelar Coffee Morning dengan awak media. Jadi sekalian kami memberikan tanda apresiasi dan terima kasih dari kontribusi beliau di kegiatan kami," ungkapnya.

Andi membeberkan, bahwa tak hanya Pj Gubernur Akmal Malik yang berkontribusi dalam kegiatan amal tersebut. Ia menyatakan bahwa sejumlah pihak dan beberapa tokoh turut memberikan andil dan dukungannya.

"Memang dukungan dari sejumlah pihak di luar ekspektasi

saya pribadi. Dan kami rencana akan roadshow memberikan tanda apresiasi ini, sekaligus melaporkan hasil kegiatan dan tentu saja mempererat silaturahmi," tandasnya.

Sementara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, dukungan yang diberikannya pada kegiatan 'Semangka untuk Gaza' merupakan bentuk komitmennya untuk bersinergi dan membangun kemitraan dengan sejumlah pihak salah satunya jurnalis.

"Selama ada jadwal kosong tidak berbenturan agenda pemerintahan saya siap jika diundang. Nanti kita buat yang lebih besar lagi," pungkasnya. (Rls)

Editor : Nicha Ratnasari



INOVASI “SIMSALABIM” DILUNCURKAN, WARGA SAMARINDA MAKIN DEKAT DENGAN PEMERINTAH

zSAMARINDA - Untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam memahami fungsi dan tugasnya, pada Kamis (16/11/2023) pagi, dilakukan Launching atau Peluncuran Sistem Layanan Informasi Berbasis Masyarakat “Simsalabim”. Kegiatan berlangsung di aula Kecamatan Samarinda Ilir, Jalan Marsda A Saleh (eks Jalan Kehewanan), Kota Samarinda.

Camat Samarinda Ilir, Ramdani SSos MSi, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Menurut Ramdani, kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari aksi perubahan, di mana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. H. Andi Harun dan Wakil Wali Kota Dr. H. Rusmadi Wongso terus berkomitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan di berbagai bidang, termasuk keterbukaan informasi.

Informasi yang berasal dari Pemkot akan disebarluaskan kepada masyarakat, dan sebaliknya, informasi dari masyarakat yang ingin disampaikan kepada Pemkot atau disebarluaskan kepada sesama masyarakat secara umum.

Ramdani mengatakan bahwa “Simsalabim” ini akan menyempurnakan semua langkah yang telah dilakukan. KIM untuk tingkat Kecamatan Samarinda Ilir dan seluruh kelurahan di Kecamatan Samarinda Ilir sudah terbentuk.

Sehingga nantinya diharapkan informasi yang diperoleh atau disampaikan benar-benar akurat dan tersebar secara efektif.

Setelah dibuka Camat Samarinda Ilir, kegiatan dilanjutkan dengan dipandu oleh moderator, yang juga Sekretaris Kecamatan Samarinda Ilir, La Uje SSos MSi, dengan menghadirkan narasumber, yaitu Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, Syamsul Anwar SSos.

Mengawali pemaparannya, Syamsul Anwar menjelaskan secara singkat struktur atau tingkatan dari KIM yang akan dibentuk, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Tugas pokok dari KIM adalah menyampaikan informasi berdasarkan kejadian serta informasi tentang ekonomi.

Manfaat dari adanya KIM hingga tingkat RT akan mempermudah, memperluas, serta mempercepat penyampaian maupun penerimaan informasi akurat untuk disebarluaskan. Sedangkan informasi berdasarkan kejadian dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat.

Diharapkan, KIM yang anggotanya berasal dari masyarakat akan benar-benar maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah. Menurut Syamsul Anwar, dalam era kemajuan teknologi informa-

si saat ini, peran aktif masyarakat sangat berpengaruh dalam penyebarluasan suatu informasi.

Informasi yang dapat diverifikasi atau merupakan informasi palsu (hoaks) akan mudah diidentifikasi oleh KIM, karena melibatkan masyarakat langsung. Sehingga pengecekan lapangan dapat dilakukan dengan cepat, dan informasi akan lebih akurat. KIM juga berperan sebagai mediator dan media pelayanan komunikasi.

Syamsul Anwar juga menjelaskan peran KIM di bidang ekonomi. KIM dapat membantu secara efektif dalam meningkatkan perputaran roda perekonomian masyarakat, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dapat menginformasikan jenis dan hasil usahanya, alamat, serta harga produknya. Melalui KIM, informasi mengenai masalah permodalan dan bantuan pemasaran produk juga dapat disampaikan, dengan melibatkan OPD terkait. Jadi, KIM benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Syamsul Anwar juga menjelaskan bahwa KIM yang berbasis di tingkat kelurahan akan dibawah oleh Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK KIM) di tingkat kecamatan, dan kecamatan akan dibawah oleh FK KIM tingkat kota.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Ketua FK KIM Kota Samarinda, Joko Iswanto, dan Pranata Humas Diskominfo Kota Samarinda, Abdillah Syafei. (KMF/ADV/MK)



PEMKOT SAMARINDA KOMITMEN WUJUDKAN SELURUH SEKOLAH RAMAH ANAK SECARA MERATA

SAMARINDA - Pemkot Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) telah menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di ruang Rapat Mangkupelas Balaikota pada Kamis (16/11/2023).

Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak selama mereka berada di sekolah. Hal ini diwujudkan dengan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman.

"Hakikatnya, seluruh sekolah harus menjadi lingkungan yang ramah bagi anak-anak. Sekolah harus senantiasa memenuhi hak dan melindungi anak-anak, serta menciptakan suasana aman dan nyaman bagi mereka. Hal ini merupakan upaya untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai kota yang sepenuhnya ramah bagi anak-anak," ungkap Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah, Marnabas, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Marnabas juga menambahkan bahwa keberadaan Sekolah Ramah Anak dirancang untuk

membentuk anak-anak yang tangguh dan mandiri sebagai persiapan menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak di lingkungan pendidikan.

"Kesiapan semua OPD sangat penting untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Komitmen kita harus tercermin dalam kesepakatan bersama. Kita dapat menjadi bangsa yang besar jika kita menghormati hak-hak anak kita," tambah PLH Sekda.

Selain itu, pembentukan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup mereka serta menciptakan ruang partisipasi anak dalam lingkungan sekolah. Hal ini juga bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perilaku salah lainnya.

"Dalam konsep sekolah ramah anak, siswa tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan juga aktif terlibat dalam pengambi-

lan kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan sehingga sekolah menjadi inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, semua pihak harus memahami hak-hak anak, termasuk guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, karyawan, satpam, serta masyarakat dan keluarga. Ini adalah tugas bersama kita, bukan hanya tugas pemerintah," ujarnya.

Marnabas berharap bahwa kegiatan ini akan meningkatkan komitmen bersama dalam mencapai Indikator Menuju Kota Layak Anak (KLA) untuk Klaster Pendidikan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan berkolaborasi dengan program-program lain seperti sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah siaga kependudukan, sekolah inklusi, dan lainnya. Dengan kerjasama ini, diharapkan target peningkatan menjadi KLA Utama tahun 2024 dapat tercapai setelah KLA Nindya berhasil diperoleh tahun ini.

"Kami berharap bahwa MTs Negeri Samarinda dapat menjadi pionir dan motivator bagi sekolah-sekolah lainnya untuk mengikuti langkah serupa dan berupaya menjadi Sekolah Ramah Anak," pungkasnya. (KMF/ADV/MK)

PEMKOT SAMARINDA TERBITKAN PERDA RTRW TAHUN 2023-2042

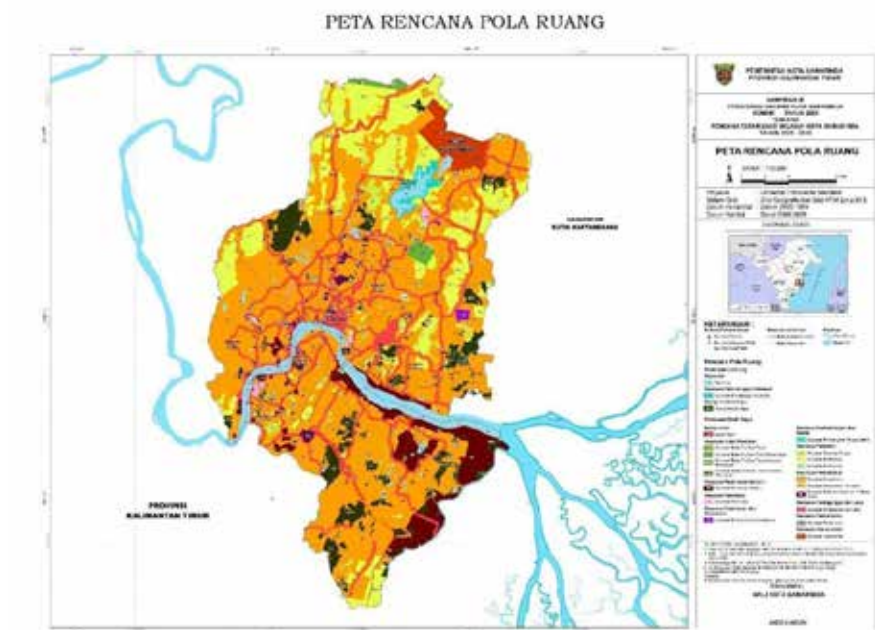
SAMARINDA - Pemkot Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042.

Perda yang ditandatangani oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, tersebut bertanggal 14 November 2023.

Perda ini mengandung 118 pasal yang terbagi dalam 15 Bab yang mencakup Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota, Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota, Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kelembagaan, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam Perda tersebut, disebutkan bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Kota terbagi menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung mencakup Badan Air (BA), Kawasan Perlindungan Setempat (PS), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara Kawasan Budi Daya mencakup Badan Jalan (BJ), Kawasan Hutan Produksi (KHP), Kawasan Pertanian (P), Kawasan Pertambangan dan Energi (TE), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Pariwisata (W), Kawasan Permukiman (PM), Kawasan Perdagangan dan Jasa (K), Kawasan Perkantoran (KT), Kawasan Transportasi (TR), dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Terdapat juga Kawasan Strategis Kota yang dibagi menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial bu-



daya, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup kawasan strategis ekonomi yang menjadi prioritas dalam program pengembangan kota, terutama terkait dengan kontribusi dalam strategi pengembangan wilayah yang lebih luas, seperti kawasan industri di Kecamatan Palaran dengan peruntukan industri kecil, menengah, dan besar di wilayah Kota Samarinda, serta kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota dengan peruntukan pengembangan sektor informal kegiatan ekonomi rakyat untuk mendukung potensi perdagangan cinderamata khas Kalimantan Timur.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya mencakup pusat warisan budaya dan tatanan kehidupan berdasarkan nilai budaya serta hasil karya cipta budaya masyarakat kota. Hal ini mencakup Kawasan Pariwisata

dan Budaya Desa Pampang yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara sebagai representasi Dayak Kenyah Kalimantan Timur, dan Kawasan Kota Lama yang terletak di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, dan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai salah satu identitas kota dan pusat sejarah Kota Samarinda.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup Kawasan Kebun Raya Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, dan Kecamatan Sungai Pinang sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap, serta kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.

Dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 ini juga mengatur Ketentuan Umum Zonasi, baik itu Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang maupun Ketentuan Umum Zonasi Untuk Pola Ruang. (ADV/MK)



MAMPU MENYULAP WILAYAH, TIM VERIFIKASI LOMBA PKK BANGGA KENCANA KESEHATAN KALTIM PUJI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

SAMARINDA - Kompak dan gigihnya warga Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah mengubah wilayah mereka menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, dan ini mendapat pujian dari Tim Verifikasi Lomba PKK Bangga Kencana Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Tim Verifikasi, Aris Ananta, menyampaikan pujian ini saat melakukan kunjungan lapangan ke sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas Bandara Berseri di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Jalan Gatot Subroto Gang 11.

Kunjungan ini merupakan perwakilan dari Kota Samarinda dalam lomba tingkat provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (16/11/2023).

Aris mengatakan bahwa dia telah melihat banyak perubahan yang terjadi. "Selama saya kuliah, saya sering berkunjung ke sini, ke rumah teman di depan masjid belakang ini. Kadang-kadang saya juga membantu memperbaiki komputer di rumah teman," ujar Aris.

Dia juga menyatakan bahwa profil Kampung Keluarga Berkualitas Bandara Berseri sangat mengesankan. "Profil yang kami terima memang sangat bagus. Namun, kami akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah profil ini sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jika sesuai, maka nilai tidak akan berubah," ungkap Aris, yang didampingi oleh tim penilai dari BKKBN Provinsi Kaltim, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, serta PKK Provinsi Kaltim.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda yang diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota Samarinda, Herry Suryansyah, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Tim Verifikasi yang telah melakukan penilaian melalui verifikasi data dan dokumen, serta kunjungan lapangan ke Kampung Keluarga Berkualitas Bandara Berseri.

"Kegiatan ini sangat baik untuk memotivasi masyarakat agar bersatu dalam partisipasi membangun Kota Samarinda. Saya juga berharap agar lembaga yang terkait dapat aktif dalam mendukung

pelaksanaan penilaian lomba PKK-Bangga Kencana-Kesehatan," ucapnya.

Dia juga menyatakan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas memiliki peran penting dalam pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas melalui pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam semua aspeknya.

"Kami yakin bahwa keluarga yang damai, mandiri, dan bahagia akan melahirkan generasi unggul, berkualitas, dan berkepribadian kuat yang akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan negara secara umum. Kami juga berharap bahwa pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas akan menjadi akselerator dalam menangani masalah yang perlu segera diatasi, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem," harapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas sejalan dengan program Pro Baby, yang merupakan program unggulan Wali Kota Samarinda, bertujuan untuk membangun masyarakat berbasis keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui integrasi program lintas sektor.

Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kampung Keluarga Berkualitas Bandara Berseri antara lain Rumah Singgah Cegah Stunting (RANTING), Kebun Cegah Stunting (BUNTING), Remaja Peduli Stunting (Remaja Penting), Orang Tua Asuh Stunting, Kegiatan Berbagi Kampung KB Bandara Berseri, Jelantah Untuk Stunting (Jelanting), dan Sosialisasi Layanan "Keren Terpadu" (Keluarga Berencana Terintegrasi Kependudukan).

Turut hadir dalam kesempatan ini Camat Sungai Pinang, Siti Hasanah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, I Gusti Ayu Sulistiani, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda, Isfihani, pimpinan Puskesmas, Wakil Ketua TP PKK Kota Samarinda, Ardaniah, Ketua Kampung Berkualitas se-Kota Samarinda, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Ketua RT Kelurahan Bandara. (KMF/ADV/MK)



Nomor 2 dari Kiri : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal , Manager Area Samarinda Media Kaltim, Adhi Abdian dan tim redaksi Media Kaltim.

DISKOMINFO KALTIM DORONG MEDIA LOKAL MENUJU TINGKAT NASIONAL

SAMARINDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal berharap media lokal di Kaltim dapat menjadi media nasional jika Infrastruktur Komunikasi Nusantara (IKN) nantinya pindah ke Kaltim.

Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah acara Coffee Morning yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, serta wartawan dan pimpinan media se-Kaltim pada Jumat (17/11/2023), untuk memperkuat posisi media lokal di tingkat nasional.

"Media di Kaltim harus mempersiapkan diri agar nanti mampu bersaing dengan media nasional, dengan cara harus menjadi media nasional," ujarnya.

Menurut Faisal, media lokal di Kaltim harus bersiap-siap dan tidak hanya bermain di tingkat provinsi. Jika media lokal tidak memenuhi standar menjadi media nasional, maka harus siap menerima konsekuensi bahwa media nasional dari Jakarta akan

mengirimkan wartawannya ke IKN di Kaltim.

Faisal juga menekankan bahwa keuntungan bagi media lokal di Kaltim adalah keberadaan mereka di wilayah Kalimantan yang memiliki kekayaan alam yang unik. Oleh karena itu, media lokal diharapkan sudah lebih siap dan mampu bersaing dengan media nasional.

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa jika media nasional atau brandnya nasional hadir di Kaltim, wartawannya sebaiknya berasal dari orang-orang Kaltim. Hal ini akan memberikan keuntungan dalam memahami kondisi lokal dan memperkuat identitas media nasional di wilayah tersebut.

"Kami berharap media lokal di Kaltim dapat terus berkembang dan menjadi media nasional yang mampu memberikan informasi yang berkualitas serta mewakili identitas dan kekayaan Kalimantan Timur," tutupnya.

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono

SAPTO SEBUT SERAPAN ANGGARAN 22 OPD RENDAH, PJ GUBERNUR BERI SINYAL MUTASI PEJABAT

SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim dari Komisi II Sapto Setyo Pramono menyebutkan bahwa ada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 41 OPD yang serapan anggarannya tahun ini di bawah target. Ia meminta Pj Gubernur untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan reward dan punishment kepada OPD yang bersangkutan.

"Kira-kira mohon sesegera mungkin dilakukan evaluasi. Apakah ini serapan dikarenakan human, sistem atau seperti apa. Selalu munculnya di belakang soal keuangan ini, seperti Silpa, selalu muncul dibelakang," ujar Sapto pada interupsinya pada Rapat Paripurna ke-47, Kamis (17/11/2023) lalu.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara OPD dan DPRD, serta mengukur kinerja OPD dengan tolak ukur TPP yang jelas.

"Saya pikir penting untuk di evaluasi, yang mana betul-betul bekerja diberikan reward dan punishment. Tolak ukur TPP harus terukur, kinerja jelas, target apa, dapat apa dan apa yang mesti diselesaikan apa, mohon izin seperti itu Pak Pj Gubernur," tegas Sapto.

Menanggapi hal tersebut, Akmal Malik mengaku sudah mengetahui OPD mana yang seharusnya bisa melakukan akselerasi. Ia juga telah melakukan evaluasi atas kinerja

OPD termasuk menghitung serapan anggaran rendah di OPD.

"Sebetulnya 15 hari sudah tahu mana OPD yang mana bekerja mana tidak," kata Akmal Malik.

Akmal Malik juga menegaskan ingin punya kaki kuat untuk pijakannya bekerja selama menjadi Pj Gubernur. Ia ingin akselerasi dan lari kencang, tetapi jika OPD tidak bisa seirama dengan visinya, ia tidak segan-segan untuk mengganti pemimpinnya.

"Ketika saya lihat persoalannya tidak bisa seirama, saya ayun se-kaki ya pilihannya angkat kaki. Artinya di situ-situ saja, kita tidak akan non-job kan, kita putar mungkin karena tempatnya tak tepat," ungkapnya.

Akmal Malik menambahkan, sebagai jalan keluar agar kinerja OPD yang di bawah target meningkat, bisa saja dia melakukan mutasi antar kepala OPD. Ia berjanji tidak akan mengganggu kabinet Isran Noor (Gubernur Kaltim Periode 2018-2023) dan tidak akan ada pejabat yang di-nonjob-kan.

"Kalau mutasi antar kepala OPD, kan tidak ada yang kehilangan jabatan atau yang dinonjobkan," pungkasnya. (eky/adv/dprd-kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Pelabuhan Kenyamukan Kutai Timur

PELABUHAN KENYAMUKAN, AGIEL: TOL LAUT BARU DI KUTIM PERMUDAH DISTRIBUSI LOGISTIK

SAMARINDA - Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pelabuhan ini juga menjadi bagian dari Tol Laut Jalur VIII yang menghubungkan Sulawesi dan Pulau Jawa dengan Kalimantan Timur.

Pelabuhan Kenyamukan dibangun sejak tahun 2012 dengan anggaran Rp120 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Pembangunan menggunakan sistem Multi Years Contract (MYC). Pelabuhan ini memiliki fungsi penting bagi warga Kutim, terutama untuk mempermudah akses transportasi laut dan logistik bagi masyarakat lokal.

Menurut Agiel Suwarno, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), pelabuhan ini dapat mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan material masyarakat setempat.

"Saya yakin jika pelabuhan tersebut beroperasi, pasti bisa mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan material masyarakat setempat," ujar Agiel.

Ia menambahkan, pelabuhan ini juga akan menjadi ikon baru bagi Kutim yang tentu efeknya bisa meningkatkan pendapatan daerah. "Itu (pelabuhan) juga akan menjadi ikon baru bagi Kutim yang tentu efeknya bisa meningkatkan pendapatan daerah," sebut Politikus PDI-Perjuangan ini.

Pelabuhan Kenyamukan juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan wilayah perairan di Pelabuhan Kenyamukan sebagai salah satu Tol Laut Jalur VIII pada tahun 2017 lalu. Apalagi letaknya sangat strategis, yakni ma-

suk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

"Pelabuhan itu mulai dibangun saat saya masih anggota DPRD Kutim. Itu tentu untuk mempermudah distribusi bahan pokok yang didatangkan dari Sulawesi dan Pulau Jawa. Aksesnya akan semakin mudah, bahkan nanti harga bisa lebih murah. Karena selama ini distribusi logistik masih berpusat di Pelabuhan Samarinda," kata Agiel.

Ia berharap pengerjaan pelabuhan tersebut dapat segera rampung sesuai target yang telah ditentukan, sehingga bisa segera beroperasi oleh warga setempat. "Proses pengerjaannya memang lumayan lama. Saya berharap pengerjaannya bisa segera rampung dan beroperasi sesuai target," harap Legislator Dapil Bontang-Kutim-Berau ini.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah mengatakan, awal tahun 2023 sudah dimulai pembangunan jalan pendekat sepanjang 650 meter dengan lebar 25 meter yang didukung dana CSR PT KPC Rp 20 miliar.

"Termasuk perbaikan jembatan yang rusak. Mudah-mudahan Oktober mendatang bisa selesai," sebutnya.

Pembangunan jalan pendekat ini dibagi menjadi dua seksi. Seksi I sepanjang 700 meter dikerjakan oleh BBPJJN, sedangkan seksi II sepanjang 650 meter dikerjakan oleh KPC. Dengan demikian, keseluruhan jalan pendekat bisa selesai sesuai target yang diharapkan. Mengingat, seksi I memang menjadi kewenangan BBPJJN. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

 **Grand Kartika**
HOTEL

OK!

TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~**30% OFF****Rp 488rb**

NETT/NIGHT

benefits**Breakfast**

2 pax

**FREE****Laundry**

Up To 2 pcs

**FREE****Kopi Inspirasi**

Buy 3, Pay 2

**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**

5 pcs

 **BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com